



Penggunaan dan Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Untuk Mendukung Digital Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Rabu, 16 Februari 2022



Dasar Hukum



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Manfaat Dan Kegunaan



Memaksimalkan efisiensi birokrasi untuk proses Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital



Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan Digital dan bersifat paperless



Mencegah duplikasi dan pemalsuan dokumen dan persuratan



Mewujudkan transformasi Digital Government



Sebagai bukti keabsahan dan Otentikasi hukum yang kuat untuk pengguna/pemilik Sertifikasi

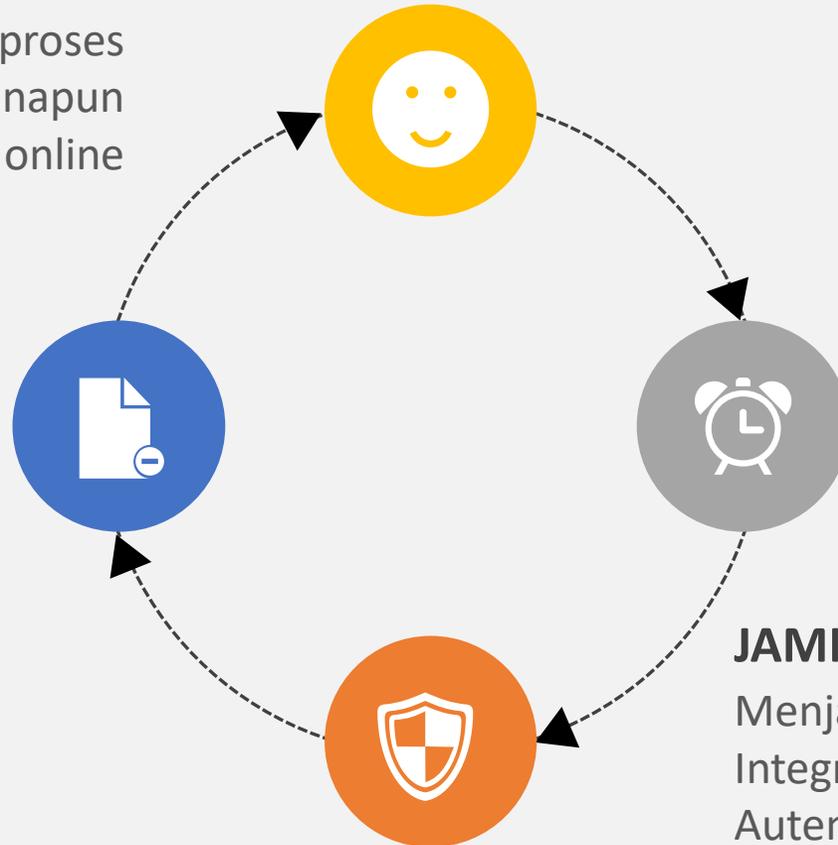
Transformasi Digital Government

KEMUDAHAN AKSES DAN PROSES

Mempermudah proses fleksibilitas baik dimanapun dan kapanpun melalui online

PAPERLESS

Mengubah proses pelayanan tanpa membutuhkan berkas/dokumen fisik



EFISIENSI WAKTU

Proses Pelayanan dapat dilakukan dan terselesaikan secara cepat dan realtime

JAMINAN KEAMANAN

Menjamin keabsahan, Integritas Data serta Autentikasi dalam produk dan pelayanan

Implementasi Tanda Tangan Elektronik di BKD



Memudahkan pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara elektronik



Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Tata Kelola dan Pelayanan Kepegawaian melalui aplikasi Surat Dinas Elektronik

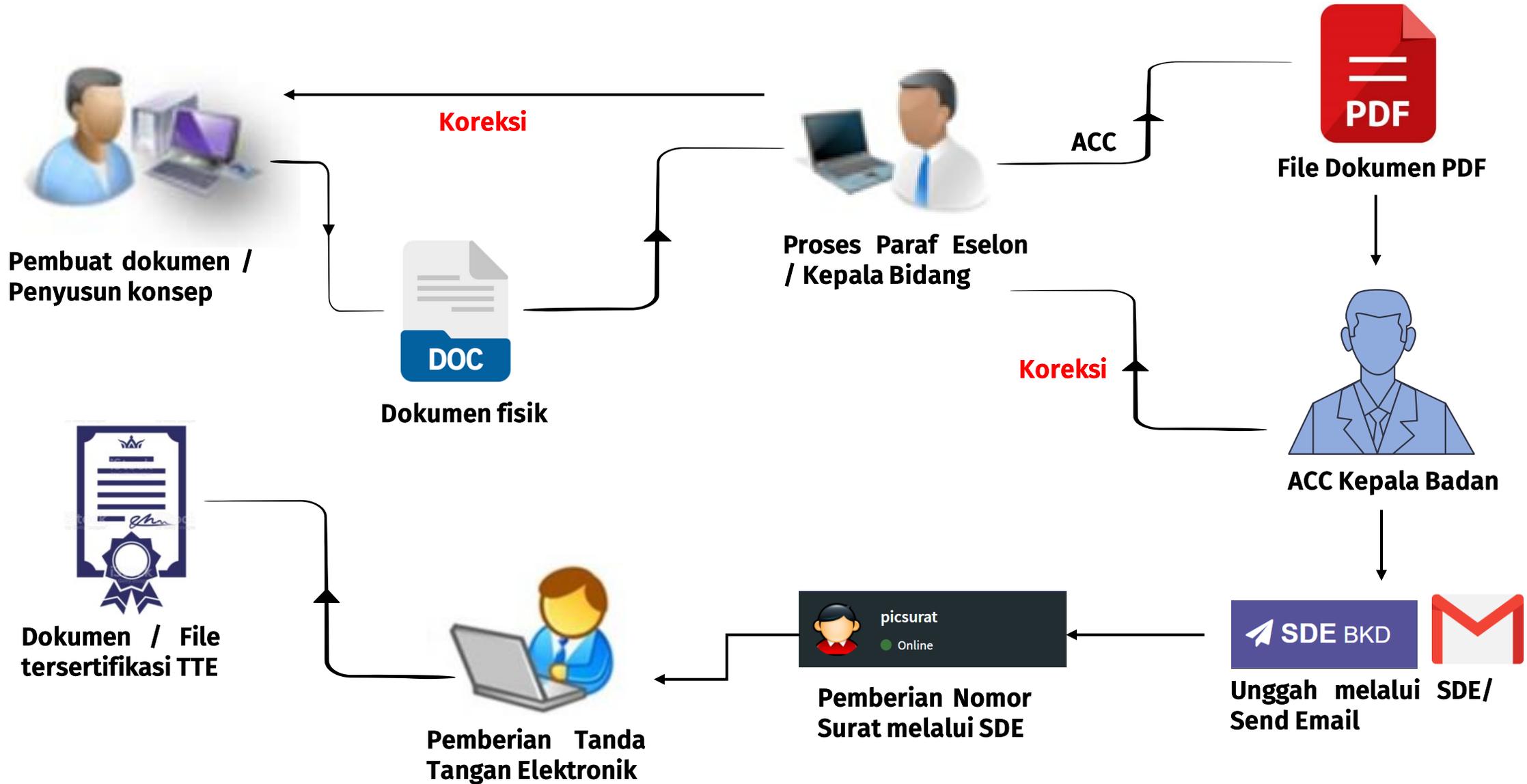


Keterpaduan pengelolaan Tata Naskah Dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum



Menghindari terjadinya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas

Alur Pengajuan Surat Dinas dan Pemberian Tanda Tangan Elektronik



Pengembangan TTE ke Depan

-  Penerapan produk dan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah secara elektronik dan menyeluruh
-  Pengajuan Sertifikasi Elektronik di setiap bidang-bidang dan menerapkan proses Tata Kelola Elektronik secara menyeluruh
-  Pengembangan Aplikasi E-Sign secara mandiri berbasis web dan mobile
-  Penggunaan TTE dan terintegrasi di setiap aplikasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Terima Kasih

BKD
JATIM

